

**ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI  
PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 21  
TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN PASAR DAN  
PENETAPAN TARIF JASA PENGELOLAAN PASAR  
( Studi Pada Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung )**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum ( S.H ) dalam Ilmu Syari'ah

Oleh :

**MIRA RESTI AYU**

**NPM : 1621020160**

**Jurusan : Hukum Tata Negara ( Siyasah Syar'iyah )**



**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1442 H / 2021 M**

**ANALISIS Fiqh SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI  
PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 21  
TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN PASAR DAN  
PENETAPAN TARIF JASA PENGELOLAAN PASAR  
( Studi Pada Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung )**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syari'ah

**Oleh :**

**MIRA RESTI AYU**

**NPM : 1621020160**

**Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyāṣah Syar'iiyah)**

**Pembimbing I : Agustina Nurhayati S.Ag, M.H**

**Pembimbing II : Hendriyadi, S.H.I, M.H.I**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1442 H/ 2021M**

## ABSTRAK

Kehadiran pasar modern telah memunculkan iklim persaingan yang tidak sehat yang merugikan pedagang kios kecil. Tidak menutup kemungkinan, kondisi yang timpang tersebut juga berpotensi munumbuhkan benih-benih kecemburuan sosial di antara para pelaku perdagangan. Membuat pedagang kios kecil semakin terpuruk, bahkan mati karena tergerus keberadaan pasar modern yang menawarkan kenyamanan berbelanja, kemudahan pembayaran, kualitas produk yang lebih baik dan nilai plus lainnya dibandingkan dengan apa yang dapat ditawarkan oleh pedagang pasar tradisional. Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti ingin melakukan kegiatan penelitian dengan judul “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pasar Dan Tarif Jasa Pengelolaan Pasar (Studi Pada Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung)”. Rumusan masalah yang penulis bahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pasar Dan Tarif Jasa Pengelolaan Pasar 1 di Kota Bandar Lampung dan bagaimana analisis fiqh siyasah terhadap Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pasar Dan Tarif Jasa Pengelolaan Pasar di Kota Bandar Lampung. Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu mengadakan penelitian lapangan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder. Pengolahan data dengan menggunakan populasi dan sampel, Analisis data menggunakan analitis kualitatif. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa implementasi peran Pemerintah Daerah dalam pengembangan pasar tradisional di Kota Bandar Lampung belum berjalan dengan maksimal. Pemerintah tidak secara langsung turun dalam pembagian zona dagang. Hal ini menyebabkan masih banyak pedagang di pasar tradisional yang tidak tertib dalam pembagian zona dagang. Sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pasar dan Penetapan Tarif Jasa Pengelolaan Pasar bahwa pengisian ruang dagangan harus ditetapkan sesuai dengan pengelompokan jenis barang dagangan. Pemerintah sebagai pemimpin yang dipilih masyarakat harus bersikap adil dan bijaksana sebagaimana yang telah diajarkan Rasulullah SAW kepada ummatnya. Sebagaimana Allah SWT mengutus RasulNya untuk membawa pada petunjuk dan agama yang benar, sebagaimana dalam QS.Al-Fath ayat 28.

## **SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mira Resti Ayu

NPM : 1621020160

Jurusan/Prodi : Siyāsah Syar’iyyah (Hukum Tata Negara)

Fakultas : Syari’ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pasar Dan Tarif Jasa Pengelolaan Pasar (Studi Pada Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 18 Desember 2020

Penulis,

Mira Resti Ayu

1621020160





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UIN RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

*Alamat: Jl. Let. Kol.H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp.(0721)703260*

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI  
PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR  
21 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN PASAR DAN  
PENETAPAN TARIF JASA PENGELOLAAN PASAR**  
(Studi Pada Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung)

**Nama : MIRA RESTI AYU**

**NPM : 1621020160**

**Jurusan : Hukum Tata Negara ( Siyasah Syar'iyah )**

**Fakultas : Syari'ah**

**MENYETUJUI**

Untuk di munaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosyah Fakultas  
Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Agustina Nurhayati S.Ag, M.H**  
**NIP. 197408162003122004**

**Pembimbing II**

**Hendriyadi, S.H, M.H.**

**Mengetahui,**  
**Ketua Jurusan Hukum Tata Negara**

**Frenki, M. Si**  
**NIP. 198003122009011017**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Alamat: Jl. Let. Kol.H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp.(0721)703260*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 21 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN PASAR DAN PENETAPAN TARIF JASA PENGELOLAAN PASAR** ( Studi Pada Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung ) Disusun Oleh **Mira Resti Ayu, NPM 1621020160**, Program Studi **Hukum Tata Negara (Siyāsah Syar’iyyah)**. Telah diujikan Dalam Sidang Munaqasyah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung Pada Rabu, 12 Januari 2021.

**TIM DEWAN PENGUJI:**

**Ketua : Frenki. M.SI.**

**Sekretaris : Arif Fikri. S.H.I., M.Ag.**

**Penguji I : Dr. H. A. Kumedi Ja’far. S.Ag., M.H.**

**Penguji II : Agustina Nurhayati S.Ag, M.H.**

**Penguji III : Hendriyadi, S.H, M.H.**

**Mengetahui  
Dekan Fakultas Syari’ah**



**Dr. H. Khatiruddin, M.H.  
NIP. 196210221993031002**



## MOTTO

(﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ﴾ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٨)

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menerapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

(QS. An-Nisa (4) : 58)



## PERSEMBAHAN

Sembah sujudku kepada Allah SWT dan Shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW semoga kita mendapat Syafaatnya. Ku persembahkan karya sederhana ini kepada:

1. Kepada kedua orang tuaku tercinta, terima kasih atas ketulusan mereka dalam mendidik, membesarkan, dan membimbing penulis dengan penuh kasih sayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Kepada kakak-kakakku tersayang yang selalu mendukung dan menemani proses dalam menyelesaikan kuliahku.
3. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.





## **RIWAYAT HIDUP**

Mira Resti Ayu seorang anak perempuan yang dilahirkan di bandar lampung, tepatnya pada tanggal 10 April 1997 yang merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara, dari pasangan suami istri Ayahanda H.I.M.S. Jamalis dan Ibundaku Nurhayati.

Pendidikan dimulai dari Taman Kanak-Kanak (TK) Riana Al- Amin Bandar Lampung, lulus pada tahun 2003. Kemudian melanjutkan ke Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Sawah Lama Bandar Lampung, lulus pada tahun 2009. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) di SMP Al- Azhar 3 Bandar Lampung, lulus pada tahun 2012. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) di SMA Negeri 12 Bandar Lampung, lulus pada tahun 2015. Terdaftar sebagai mahasiswa di jurusan Hukum Tata Negara (Siyāsah Syar’iyyah) Fakultas Syari’ah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2016.



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi dengan judul “**Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pasar Dan Tarif Jasa Pengelolaan Pasar (Studi Pada Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung)**”. Shalawat dan salam semoga Allah melimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan Umatnya. Skripsi ini disusun sebagai tugas dan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Siyāsah Syar’iyyah, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, motivasi, saran dan kritik yang telah diberikan oleh semua pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih seluruhnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. KH. Moh Mukri, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menimba ilmu pengetahuan di kampus tercinta ini.
2. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si selaku ketua Jurusan Siyāsah Syar’iyyah Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh pegawai Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.
5. Ibu Agustina Nurhayati S.A.g, M.H., selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak Hendriyadi, S.H.I, M.H.I, selaku Pembimbing II yang telah membimbing penulis serta meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung, kepada Perpustakaan Daerah Provinsi Lampung dan kepada Perpustakaan Fakultas Syari'ah atas diperkenankannya peneliti meminjam literatur yang dibutuhkan.
8. Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung yang telah memberikan izin peneliti mencari refrensi dalam rangka penyusunan skripsi ini.
9. Kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung yang telah memberikan izin peneliti mendapatkan refrensi dalam rangka penyusunan skripsi ini.
10. Kepada Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, yang telah memberikan izin peneliti mencari referensi dalam rangka penyusunan skripsi ini.
11. Ayah dan Ibu yang selalu memberikan perhatian, doa, dukungan formil maupun moril, serta kasih sayangnya. Kakak-kakakku tersayang yang selalu memberikan dukungan dan senyum semangat kepadaku.
12. Sahabat membantuku dalam perskripsian duniawi (Muhammad Ilham Akbar, Hera Anita Herlina, Agustin Mayasari, Erni Yana.)



Demikianlah mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya, semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat ganda atas bantuan yang telah diberikan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi maupun studi di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Amin Yarobbal Alamin.

Bandar Lampung, 18 Desember 2020

Penulis

Mira Resti Ayu

1621020160



## **DAFTAR GAMBAR**

1. Foto Kantor Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung
2. Foto Wawancara Bersama Sub. Bagian Umum Dan Kepegawaian
3. Foto Wawancara Bersama Bidang Bina Pasar
4. Foto Bersama Pedagang Perumnas Way Halim



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
SURAT PERNYATAAN .....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iv
PENGESAHAN .....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN .....	vii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	xii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	2
C. Latar Belakang Masalah .....	3
D. Fokus Penelitian .....	11
E. Rumusan Masalah .....	11
F. Tujuan Penelitian .....	11
G. Signifikasi Penelitian .....	12
H. Metode Penelitian .....	12

### BAB II LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori .....	19
1. Fiqh Siyasah .....	19
a. Kedudukan Fiqh Siyasah .....	22
b. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah .....	25
c. Kriteria Fiqh Siyasah .....	28
d. Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah .....	32
2. Pengembangan Pasar Tradisional .....	32
a. Definisi Pengembangan Pasar Tradisional .....	32
b. Faktor-Faktor Pengembangan Pasar Tradisional .....	37
c. Dasar Hukum Pengembangan Pasar .....	39
3. Revitalisasi Sebagai Bentuk Pengembangan Pasar .....	42
4. Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Pasar .....	46
B. Tinjauan Pustaka .....	51



### **BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung .....	55
1. Sejarah Berdirinya Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung .....	55
2. Visi dan Misi Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung .....	55
3. Wilayah Pelayanan Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung ....	56
4. Bidang Pembinaan Dinas Perdagangan .....	58
5. Struktur Organisasi Dinas Perdagangan .....	59
B. Implementasi Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pasar Dan Tarif Jasa Pengelolaan Pasar di Kota Bandar Lampung .....	60
1. Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Pasar Tradisional di Kota Bandar Lampung .....	62
2. Pengembangan Pasar Tradisional di Kota Bandar Lampung .....	67
3. Faktor-Faktor Yang Menghambat Pengembangan Pasar Tradisional di Kota Bandar Lampung .....	68

### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A. Implementasi Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pasar Dan Tarif Jasa Pengelolaan Pasar di Kota Bandar Lampung .....	71
B. Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Pelaksanaan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pasar Dan Tarif Jasa Pengelolaan Pasar di Kota Bandar Lampung .....	74

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	79
B. Rekomendasi .....	80

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Penegasan Judul

Untuk memahami judul skripsi ini, maka perlu dipertegas judul yang akan saya lakukan penelitiannya yaitu ”Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pasar Dan Tarif Jasa Pengelolaan Pasar (Studi Pada Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung)”.

Adapun uraian pengertian beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini adalah :

##### 1. Analisis

Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan atas bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.<sup>1</sup>

##### 2. Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah merupakan *tarkib idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni fiqh dan siyasah. Secara etimologi, fiqh merupakan bentuk *masdhar (gerund)* dari tashrifan kata *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Sedangkan secara

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Pustaka Grafika, 2003), h. 43

terminologi, fiqh lebih populer didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum *syara'* yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.<sup>2</sup>

### 3. Implementasi

Adalah tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang disusun secara matang dan terperinci.<sup>3</sup>

### 4. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pasar Dan Tarif Jasa Pengelolaan Pasar.

Dari penjelasan di atas maka yang dimaksud penulis adalah penelaahan berdasarkan hukum Islam terhadap penerapan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pasar Dan Tarif Jasa Pengelolaan Pasar.

### B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan yang mendorong penulis untuk memilih ” Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pasar Dan Tarif Jasa Pengelolaan Pasar (Studi Pada Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung)” adalah sebagai berikut :

#### 1. Alasan Objektif

Permasalahan tersebut menarik untuk dibahas dan dilakukan penelitian untuk mengkaji lebih dalam mengenai peran pemerintah

---

<sup>2</sup> Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial: Dirasah Islamiyah III*, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, 1994, h. 95

<sup>3</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, h. 352



daerah dalam pengembangan pasar tradisional. Karena dengan adanya pasar modern menyebabkan penghasilan di pasar tradisional menurun dan pasar tradisional disisihkan.

## 2. Alasan Subjektif

Pembahasan ini sangat relevan dengan disiplin ilmu pengetahuan yang penulis pelajari di Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Siyasah serta terjadinya literatur yang menunjang sebagai referensi kajian dan data dalam usaha menyelesaikan karya ilmiah.

### C. Latar Belakang Masalah

Al Quran mengajarkan antara lain prinsip tauhid, permusyawaratan, ketaatan kepada pimpinan, persamaan, keadilan, kebebasan beragama dan sikap saling menghormati antar sesama manusia. Tetapi Al Quran tidak menetapkan satu sistem pemerintahan yang baku yang harus dianut umat Islam, kapan dan di mana pun mereka berada.

Kajian mengenai sistem dan tatalaksana pemerintahan itu berkembang dan berbeda dari satu tempat ke tempat lain dan dari satu masa ke masa yang lain, sesuai dengan kondisi dan situasi yang berbeda-beda. Hal-hal yang menyangkut ketatanegaraan ini bisa ditemukan dalam fikih (hukum) Islam, yang sumber utamanya adalah Al Quran dan sunnah. Istilah yang digunakan untuk menyebut bidang ini adalah fikih siyasah. Istilah lainnya adalah *Siyasah Syar'iyah al-Khilafah* (pemerintahan), dan *al-Ahkam as-Sultaniyah* (hukum pemerintahan).

Fiqh Siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Objek kajian Fiqh Siyasah secara substansial berkaitan dengan ketatanegaraan, yang di dalamnya membicarakan perihal berikut:<sup>4</sup>

1. Hak-hak individu dalam bernegara;
2. Hak dan kewajiban individu dan masyarakat sebagai warga negara;
3. Hak dan kewajiban pemerintahan suatu negara;
4. Strategi operasional dalam melaksanakan pemilihan umum demi mencapai ledersitas suatu pemerintahan;
5. Perundang-undangan yang mengatur kehidupan politik masyarakat dan negara;
6. Pelaksanaan demokrasi politik;
7. Pengelolaan negara dan pencapaian tujuan;
8. Nilai-nilai kemaslahatan dalam bernegara.

Dunia saat ini dikuasai oleh kapitalisme. Ini merupakan produk sejarah perkembangan masyarakat, bukan kehendak manusia, perkembangan kapitalisme merupakan suatu keharusan sejarah. Kapitalisme merupakan anak kandung feodalisme. Kapitalisme menguasai kehidupan sosial, politik dan budaya. Secara tidak langsung, pasar modern juga memperlihatkan bahwa kapitalisme mulai menjajah ke Indonesia, padahal secara tekstual Indonesia menganut sistem perekonomian Pancasila yang berasaskan kekeluargaan

---

<sup>4</sup> Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam*, (Bandung, Pustaka Setia, 2008), h 36

(koperasi). Sistem kapitalisme sangat menguntungkan bagi pemilik modal. Kapitalisme memberikan keleluasaan para pemilik modal untuk menjalankan perekonomian yang bertujuan mencari keuntungan sebesar-besarnya, maka pemilik modal besar akan memiliki kesempatan seluas-luasnya dalam mengembangkan sayap perekonomian, tetapi bagi pedagang tradisional yang memiliki modal kecil sulit bersaing dengan pasar modern akan merugi hingga akhirnya bangkrut atau gulung tikar.

Kebebasan dalam melakukan kegiatan ekonomi yang tidak ada batasnya dapat merugikan golongan yang lemah dan kaum minoritas. Persaingan yang sangat bebas menyebabkan golongan yang kuat kedudukannya bertambah kuat lagi. Persebaran pasar modern pada satu sisi memiliki dampak yang positif, hal ini membuktikan adanya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan menciptakan investasi, namun disisi lain hal ini dapat menyebabkan kelesuan para pedagang kecil seperti pedagang kaki lima, bahkan mematikan usaha mereka.

Kehadiran pasar modern tersebut telah memunculkan iklim persaingan yang tidak sehat yang merugikan pedagang kios kecil. Tidak menutup kemungkinan, kondisi yang timpang tersebut juga berpotensi munumbuhkan benih-benih kecemburuan sosial diantara para pelaku perdagangan. Membuat pedagang kios kecil semakin terpuruk, bahkan mati karena tergerus keberadaan pasar modern yang menawarkan kenyamanan berbelanja, kemudahan pembayaran, kualitas produk yang lebih baik dan nilai plus



lainnya bila dibandingkan dengan apa yang dapat ditawarkan oleh pedagang pasar tradisional.

Masyarakat yang awalnya memiliki ciri-ciri ikatan solidaritas yang kuat, masyarakat yang homogen, masyarakat yang tertutup akan penemuan baru, dinamis, dan punya sifat yang unik pedalaman dimana sifat ini sebagai akibat dari kurangnya kontak dengan dunia luar, mereka sangat toleran dengan nilai-nilai yang dimilikinya, dan sangat intoleran terhadap nilai-nilai yang dimiliki kelompok lain. Namun terlihat sekarang sudah mengalami perubahan sosial dimana masyarakat desa mulai terbuka terhadap hal-hal baru. Contoh yang dapat kita lihat di pasar modern yang awalnya masyarakat hanya berbelanja di pasar tradisional namun sekarang sudah beralih ke pasar modern.

Berdasarkan praktek yang telah berlangsung lama tersebut para pemikir memahami pasar sebagai sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak peradaban awal manusia.<sup>5</sup> Namun secara sederhana orang-orang lebih mendefinisikan pasar sebagai tempat pertemuan antara produsen dan konsumen untuk mengadakan transaksi.<sup>6</sup>

Adapun pengakuan terhadap adanya peran Negara dalam ilmu ekonomi dimulai dari kesadaran ekonomi makro untuk menggunakan entitas Negara sebagai salah satu dasar analisis. Sehingga hal ini membuktikan Negara menjadi representasi individu-individu dalam mencapai tujuan ekonomi kolektif, meski para ekonomi dengan cepat memahami adanya sebuah jurang kesengajaan yang berpotensi untuk menyatukan perjalanan arah ilmu

---

<sup>5</sup> *Ibid*, h. 301

<sup>6</sup> Mashuyhuri, *Ekonomi Mikro* (Malang : UIN Malang Perss, 2007), h.199.

ekonomi yang telah menganga di depan mata. Berawal dari kesadaran itu lahir berbagai doktrin maupun pemahaman tentang peran pemerintah terhadap pasar, seperti paham sosialis dan kapitalis.

Keberadaan pasar tradisional semakin terdesak oleh banyaknya pasar modern atau pusat perbelanjaan yang dibangun pemerintah. Keberadaan pasar modern berpengaruh pada berbagai hal, diantaranya adalah perubahan tata lingkungan, perubahan sosial dan ekonomi masyarakat. Pembangunan pasar modern seperti mall, Indomaret, Alfamart dan sejenisnya sering merusak taat lingkungan kota. Tidak jarang dari mereka yang menggunakan lahan persawahan, taman kota, atau lahan di perkotaan yang ditanami pohon-pohon besar untuk mendirikan mall.

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan pasar modern dewasa ini sudah menjadi tuntutan dan konsekuensi dari gaya hidup modern yang berkembang di masyarakat kita. Tak hanya di kota metropolitan tetapi sudah merambah sampai kota kecil di tanah air. Sangat mudah menjumpai minimarket, supermarket bahkan hipermarket di sekitar tempat tinggal kita. Tempat-tempat tersebut menjanjikan tempat belanja yang nyaman dengan harga yang tidak kalah menariknya. Namun dibalik kesenangan tersebut ternyata telah membuat pedagang kecil, menengah atau konsumen mengeluh.<sup>7</sup>

Maraknya pembangunan sejumlah *hypermarket* dan *minimarket* di sejumlah kota besar membuat pedagang pasar tradisional khawatir. *Minimarket* yang menjamur di perumahan, rasanya hampir bisa diterima di

---

<sup>7</sup> Herman Malano, *Selamatkan Pasar Tradisional: Potret Ekonomi Rakyat Kecil*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h.159

setiap Rukun Warga. Pasar yang tadinya dikuasai toko kelontongan dan makanan ringan, kini diambil alih oleh minimarket. Banyaknya mall yang dibangun semakin membuat pasar tradisional terlupakan. Apalagi ditambah dengan adanya anggapan dari sebagian kalangan bahwa pasar tradisional itu kotor dan barang yang dijual itu tidak berkualitas.<sup>8</sup>

Pasar tradisional merupakan kawasan kumuh sedangkan di Mall bersih dan pelayanan yang memuaskan. Jika diamati sebenarnya banyak sekali yang bisa didapatkan dari pasar tradisional. Di pasar tradisional terdapat suatu komunikasi yang tidak akan ditemui di pasar modern dan di mall. Di pasar tradisional diberikan tawar-menawar dalam transaksi jual belinya membuat suatu hubungan tersendiri antara penjual dan pembeli.<sup>9</sup>

Sopan santun merupakan strategi dan kunci sukses penjualan, meskipun tidak mengesampingkan kualitas barang dan harga. Barang di pasar tradisional juga tidak kalah dengan pasar modern. Mulai dari kehidupan sehari-hari seperti sayur dan buah-buahan juga banyak yang bagus dan masih segar-segar, untuk bahan pangan juga beragam mulai dari yang harganya rendah sampai yang tinggi, sehingga pembeli biasa menyesuaikan dengan budget yang ada.

Berbeda dengan pasar modern, disana harga sudah ditetapkan dan tidak ada komunikasi antara penjual dan pembeli. Dengan demikian keberadaan pasar tradisional harus di pertahankan karena terdapat nilai-nilai yang tidak terdapat pada pasar modern dan perlu untuk dilestarikan. Hal ini tentu saja

---

<sup>8</sup> Alam S. *Ekonomi untuk SMA dan MA Kelas X*, (Jakarta: Erlangga, 2013) h, 126

<sup>9</sup> Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Edisi Kelima, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h.6

tidak terlepas dari peran pemerintah sebagai pembinanya.<sup>10</sup> Permasalahan lain yang terjadi di beberapa pasar tradisional adalah:<sup>11</sup>

- a. Terjadi perubahan peraturan perundang-undangan baik vertikal maupun horizontal yang berhubungan dengan pengelolaan pasar tradisional,
- b. Pelaksanaan pengelolaan fisik (lahan, pemanfaatan dan pengembangan lahan) maupun non fisik (situasi kondisi dan kegiatan jual beli, psikologis pedagang dan kelanjutan aktivitas perdagangan),
- c. Penataan zonasi pasar,
- d. Hambatan dalam perolehan dan pendapatan dari retribusi pasar yang tidak sesuai target,
- e. Perubahan kelas pasar,
- f. Permasalahan sarana pasar meliputi sarana utama dan sarana pendukung,
- g. Penempatan pedagang,
- h. Pelanggaran tata tertib pasar,
- i. Persampahan dan kebersihan pasar
- j. Manajemen pasar,
- k. Pembiayaan modal.

Keberlangsungan sebuah pasar ditentukan oleh pendapatan yang diperoleh dari operasional pasar untuk membiayai operasional pasar. Pendapatan pasar dapat diperoleh dari berbagai sumber. Memaksimalkan pendapatan pasar merupakan sebuah keharusan bagi pengelola pasar untuk

<sup>10</sup> Rismayani, *Manajemen Pemasaran*, Cetakan Ke Enam (Bandung: Mizan, 1999), h.61

<sup>11</sup> Tony Hartono, *Mekanisme Ekonomi Dalam Konteks Ekonomi Indonesia*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006) h. 9



menjaga keberlangsungan pasar itu sendiri. Selain penggalan sumber pendapatan pasar, pengelola juga harus dapat meminimalisasi tingkat kebocoran pendapatan yang sering terjadi pada operasional pasar. Peningkatan pendapatan dalam pasar tradisional melalui pungutan pembayaran, sistem dan prosedur pembayaran yang baik dan sistem komersial pasar.<sup>12</sup>

Adanya aturan yang dibuat oleh pemerintah tentang pengelolaannya menunjukkan bahwa pasar merupakan salah satu lembaga paling penting dalam institusi ekonomi. Berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pasar dan Penetapan Tarif Jasa Pengelolaan Pasar menjelaskan bahwa pengembangan pasar dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan pengisian ruang dagang harus ditetapkan berdasarkan pengelompokkan jenis barang.<sup>13</sup>

Adapun aktivitas penjualan dan pembelian sangat mempengaruhi berfungsinya lembaga pasar sebagai institusi ekonomi. Sayangnya, saat ini pasar tradisional telah menjadi perhatian banyak pihak, terutama setelah pemerintah mencanangkan program revitalisasi pasar tradisional.

Program revitalisasi ini digagas enggan maksud merespon permasalahan dari pasar tradisional di Indonesia yang sering dicitrakan sebagai suatu tempat yang kumuh, kotor, becek , tidak terawat dan mempunyai tingkat kualitas hunian yang sangat rendah, sehingga diprediksi keberadaan pasar tradisional diperkotaan akan segera punah. Sejalan dengan hal di atas penulis berasumsi bahwa peranan pasar sangat strategis sebagai penggerak roda perekonomian

---

<sup>12</sup> *Ibid*, h 16

<sup>13</sup> Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pasar dan Penetapan Tarif Jasa Pengelolaan Pasar Pasal 13 dan 14

khususnya perekonomian daerah apabila berbicara mengenai pasar tradisional.<sup>14</sup>

#### D. Fokus Penelitian

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang tertuang dalam latar belakang masalah, maka fokus penelitian penulis adalah Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pasar Dan Tarif Jasa Pengelolaan Pasar.

#### E. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas rumusan masalah yang akan penulis bahas adalah:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pasar Dan Tarif Jasa Pengelolaan Pasar di Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana analisis fiqh siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pasar Dan Tarif Jasa Pengelolaan Pasar?

#### F. Tujuan penelitian

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah :

1. Ingin menganalisis implementasi Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pasar Dan Tarif Jasa Pengelolaan Pasar di Kota Bandar Lampung.

---

<sup>14</sup> Nirma Kurriawati, “Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Kepuasan dan Dampaknya Terhadap Loyalitas Konsumen”, Jurnal (Bangkalan: Fakultas Ekonomi Universitas Trunojoyo, 2015), h 48.

2. Ingin menganalisis fiqh siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pasar Dan Tarif Jasa Pengelolaan Pasar.

#### G. Signifikasi Penelitian

##### 1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan ketajaman analisis yang terkait dengan masalah peran pemerintah dalam pengembangan pasar tradisional.

##### 2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran terhadap salah satu keilmuan hukum Islam yaitu keilmuan dibidang Siyasah dan sebagai salah satu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

#### H. Metode Penelitian

##### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

###### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan *field research*, yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan di lapangan, seperti di lingkungan masyarakat, lembaga-lembaga dan organisasi kemasyarakatan dan lembaga pemerintahan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk menerangkan fenomena sosial atau suatu peristiwa.

## b. Sifat Penelitian

Metode ini bersifat deskriptif analisis, sehingga data yang dikumpulkan lebih banyak berupa kata atau gambar daripada data dalam bentuk angka-angka yang lebih menekankan proses daripada produk. Metode ini cenderung menganalisis data secara induktif. Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa metode penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu gejala atau hubungan antara dua gejala atau lebih.<sup>15</sup>

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Data adalah semua fakta dan angka-angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun sebuah informasi.<sup>16</sup> Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

- a. Sumber data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugasnya) dari sumber pertamanya.<sup>18</sup> Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah pada penelitian ini adalah 5 orang pegawai Dinas Pengelolaan Pasar Kota

---

<sup>15</sup>Suharsami Arikonto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 246.

<sup>16</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, h. 127

<sup>17</sup>*Ibid*, h 129

<sup>18</sup>*Ibid*, h 130



Bandar Lampung dan 5 orang pedagang Pasar Tradisional Perumnas Way Halim.

- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini, dokumentasi, buku – buku, dan situs internet.

### 3. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Dalam penelitian, populasi didenifisikan sebagai kelompok subjek yang hendak dikenai generalisasi hasil penelitian.<sup>20</sup> Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek, yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung.

#### b. Sampel

Sampel adalah suatu bagian populasi yang dianggap mewakili data yang akan diteliti.<sup>21</sup> Teknik pengambilan sampel untuk sebuah penelitian adalah jika subjeknya kurang dari 100 orang sebaiknya diambil semuanya, jika subjeknya besar atau lebih dari 100 orang

---

<sup>19</sup>*Ibid*, h 93

<sup>20</sup>*Ibid*, h 94

<sup>21</sup>Suharsimi Arikunto. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta, h 131

dapat diambil 10-15% atau 20-25% atau lebih.<sup>22</sup> Sampel pada penelitian ini adalah 5 orang pegawai Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung dan 5 orang pedagang Pasar Tradisional Perumnas Way Halim.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya.<sup>23</sup>

##### a. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk menunjang teknik observasi dalam penelitian ini adalah wawancara (sumber data sekunder). Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil.<sup>24</sup>

Wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk mengungkapkan kelebihan dan kesulitan dalam penerapan pembelajaran berbasis pendekatan ilmiah. Jenis wawancara ini cocok sebagai penelitian kasus.<sup>25</sup> Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini ditujukan kepada 5 orang pegawai Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung.

---

<sup>22</sup>*Ibid*, h 140

<sup>23</sup>*Ibid*, h 140

<sup>24</sup>*Ibid*, h 137

<sup>25</sup>*Ibid*, 247

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data lain yang digunakan untuk menunjang teknik observasi selain teknik wawancara yaitu dokumentasi (sumber data sekunder). Teknik dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.<sup>26</sup>

5. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang dilakukan. Karena penelitian ini menggunakan metode kualitatif, maka metode pengolahan data dilakukan dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.

a. *Editing* (Pemeriksaan Data)

*Editing* adalah meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain.<sup>27</sup>

b. Sistematika Data

Dalam penelitian kualitatif belum terdapat format baku tahapan-tahapan atau sistematika yang dapat dijadikan patokan dalam penelitian. Ini dikarenakan penelitian kualitatif terkait dengan salah-satu karakteristik dari

---

<sup>26</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 202.

<sup>27</sup> Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), h. 85.

penelitian kualitatif itu sendiri, yaitu fleksibel. Sehingga dengan ke-fleksibelan-nya jalan penelitian berubah-ubah sesuai dengan kondisi yang ada.<sup>28</sup> Akan tetapi, meskipun demikian para ahli sependapat bahwa setidaknya terdapat lima tahapan sebagai patokan dalam penelitian, yaitu tergambar sebagai berikut:

1. Mengangkat permasalahan.

Permasalahan yang biasanya diangkat dalam penelitian ini adalah bersifat unik, khas, memiliki daya tarik tertentu, spesifik, dan terkadang sangat bersifat individual (karena beberapa penelitian kualitatif yang dilaksanakan memang huan untuk kepentingan generalisasi).

2. Memunculkan pertanyaan penelitian.

Pertanyaan merupakan ciri khas dari penelitian kualitatif. Adalah sebagai *spirit* yang fungsinya sama penting seperti hipotesis dalam penelitian kuantitatif.

3. Mengumpulkan data yang relevan.

Data dalam penelitian kualitatif pada umumnya berupa kumpulan kata, kalimat, pernyataan, atau uraian yang mendalam.

4. Melakukan analisis data

Analisis data merupakan langkah berikutnya setelah data relevan diperoleh.

5. Menjawab pertanyaan penelitian

---

<sup>28</sup> Haris herdiansyah. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Sosial*. (Jakarta : Salemba Humanika, 2018). h. 14.



Tahap ini adalah tahapan terakhir dalam penelitian kualitatif. Dalam menjawab pertanyaan, peneliti dapat menggunakan gaya menulis yang lebih bebas, seperti narasi atau *storytelling*. Sehingga dalam menjawab pertanyaan penelitian dapat lebih menarik untuk dibaca.

Kemudian, selain dari kelima tahapan di atas, beberapa para ahli penelitian kualitatif mengemukakan beberapa format penulisan penelitian kualitatif berdasarkan sudut pandang masing-masing.<sup>29</sup>

## 6. Analisis Data

Analisa data dilakukan dengan metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>30</sup> Metode penelitian kualitatif dalam pembahasan skripsi ini adalah dengan mengemukakan analisis dalam bentuk uraian kata-kata tertulis, dan tidak berbentuk angka-angka. Dengan metode analisis inilah peneliti berusaha untuk menggambarkan sekaligus menganalisa secara deskriptif dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

---

<sup>29</sup> *Ibid*, h. 15.

<sup>30</sup> Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), h. 48-49.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kajian Teori

##### 1. Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah sebagai salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan manusia itu sendiri terlepas dari masa pemerintahan setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Walaupun di dalam Al Qur'an tidak ada satu dalil pun yang secara eksplisit memerintah atau mewajibkan umat Islam untuk mendirikan negara. Lebih dari itu bahkan istilah negara (*Daulah*) pun tidak pernah disinggung dalam Al Qur'an, tetapi, unsur-unsur dasar dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara, dapat ditemukan didalamnya. Beberapa prinsip pokoknya antara lain musyawarah, keadilan, dan persamaan.<sup>31</sup>

Kata siyasah yang merupakan bentuk *masdar* atau kata benda abstrak dari kata sasa, ( ساس - يسوس - سياسة ) memiliki banyak makna yaitu mengemudi, mengendalikan, pengendali, cara pengendalian.<sup>32</sup> Sasa juga berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan

---

<sup>31</sup> Mujar Ibnu Syarif, *Hak-Hak Minoritas Non-Muslim Dalam Komunitas Islam* (Bandung: Angkasa Bandung, 2003), h. 11

<sup>32</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h 3

pembuat kebijakan. Selain itu, siyasah juga dapat diartikan administrasi dan manajemen.<sup>33</sup>

Secara termonologi, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa Siyasah adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sementara Louis Ma'luf memberikan batasan bahwa Siyasah adalah membuat maslahat manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan. Sedangkan Ibn Manzhur mendefenisikan Siyasah sebagai mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.<sup>34</sup> Sedangkan di dalam Al Munjid disebutkan, siyasah adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. Siyasah juga berarti ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan atas dasar keadilan dan istiqomah.<sup>35</sup>

Berdasarkan beberapa arti di atas, maka tidak keliru jika dikatakan bahwa siyasah berarti penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan. Karena dalam penyelenggaraan negara itu sudah pasti ada unsur mengendalikan, mengatur, memerintah, mengurus, mengelolah, melaksanakan administrasi, dan membuat kebijaksanaan dalam

---

<sup>33</sup> Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), hlm. 74

<sup>34</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h 4

<sup>35</sup> *Ibid*, h 22

hubungannya dengan kehidupan masyarakat.<sup>36</sup> Siyasah yang didasarkan pada Al Qur'an dan Hadis Nabi dikenal dengan istilah Siyasah syar'iyah yakni Siyasah yang dihasilkan oleh pemikiran manusia yang berdasarkan etika, agama, dan moral dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum syari'at dalam mengatur hidup manusia bermasyarakat dan bernegara. Siyasah syar'iyah disebut juga politik ketatanegaraan yang bersifat syar'i.<sup>37</sup>

Mayoritas ulama syariat dan pakar undang-undang dalam konstitusional meletakkan musyawarah sebagai kewajiban keislaman dan prinsip konstitusional yang pokok diatas prinsip-prinsip umum dan dasar yang baku yang telah ditetapkan oleh nash-nash Al-Quran dan hadis nabawi. Solusi untuk mendapatkan keadilan dalam Islam yakni dengan bermusyawarah, bahwa dalam bermusyawarah Islam memberikan batasan-batasan yakni tidak boleh melampaui kepada apa yang telah ada nash-nya secara pasti dan jelas, maka dalam hal ini larangan untuk berijtihad disana, kecuali ijtihad untuk memahami atau dalam rangka menerapkannya hal ini sesuai dengan Q.S Al-Imran ayat 159 yang berbunyi :

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ  
لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۚ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي  
الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

<sup>36</sup> Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), h 42

<sup>37</sup> *Ibid*, h 76

Artinya :

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. (QS Ali Imran ayat 159)

Menurut Imam Ibnu Abbas berhubungan dengan kisah Rasulullah saat perang badar. Pada waktu itu, pasca perang Badar Nabi Muhammad SAW mengajak musyawarah Abu Bakar dan Umar bin Khattab terkait para tawanan perang Badar. Sahabat Abu Bakar memberikan usulan kepada Rasulullah agar para tawanan dikembalikan kepada keluarganya dengan membayar sejumlah tebusan. Sedangkan Umar berpendapat agar para tawanan perang dieksekusi dan yang mengeksekusi adalah keluarga mereka sendiri. Menanggapi usulan dua sahabatnya, Rasulullah mengalami kesulitan dalam memutuskan pendapat siapa yang akan digunakan. Kemudian, turunlah Surat Ali Imran Ayat 159 yang mengkonfirmasi pendapat sahabat Abu Bakar Shidiq.<sup>38</sup>

a. Kedudukan Fiqh Siyasah

Berdasarkan pembahasan pengertian fiqh siyasah (*Siyasah Syar'iyah*) di dalam hukum Islam, perlulah untuk diketahui dulu sistematika hukum Islam secara umum. Dengan diketahui sistematika hukum Islam, maka

---

<sup>38</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h 7



dapatlah difahami kedudukan fiqh siyasah di dalam sistematika hukum Islam. Secara global hukum Islam dapat dibagi dalam dua bagian pokok, yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia kepada Tuhannya dan hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia dalam masalah-masalah keduniaan secara umum (*mu'amalah*).<sup>39</sup>

Tatanan yang pertama sudah jelas, tegas dan tidak mengalami perkembangan, tidak membuka peluang untuk penalaran manusia. Sedangkan tatanan yang kedua dasarnya adalah segala sesuatu yang menyangkut hak-hak sesama manusia. Ketentuan-ketentuannya dijelaskan secara umum, dan masih dapat dikembangkan lebih lanjut untuk mewujudkan kemaslahatan yang merupakan tujuan utama dan menegakkan ketertiban hubungan dalam kehidupan masyarakat.<sup>40</sup>

Syari'at adalah ketentuan-ketentuan hukum yang tegas ditunjukkan oleh Al Qur'an dan sunnah Rasulullah yang dapat dibuktikan kesahihannya, sedangkan fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci dan fiqh adalah hasil dari ijtihad dan pemahaman ulama terhadap dalil-dalil hukum terutama Al Qur'an dan Hadis. Fiqh siyasah atau *siyasah syar'iyyah* adalah otoritas pemerintah untuk melakukan berbagai kebijakan melalui berbagai peraturan dalam rangka mencapai kemaslahatan sepanjang tidak

---

<sup>39</sup> *Ibid*, h 8

<sup>40</sup> YUSDANI, Fiqh Politik *Muslim Doktrin Sejarah dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Amara Books, 2011), h 21

bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama sekalipun tidak terdapat dalil tertentu.<sup>41</sup>

Fiqh siyasah atau *siyasah syar'iyah* berarti politik menurut ajaran syari'at. Dalam bidang ini dibahas tentang ketatanegaraan dalam ajaran Islam. *Siyasah syar'iyah* atau fiqh siyasah lebih terbuka (dinamis) dari pada fiqh dalam menerima perkembangan dan perbedaan pendapat. Perbedaan kondisi dan perkembangan zaman berpengaruh besar terhadap *siyasah syar'iyah*.<sup>42</sup> Dalam fiqh siyasah pemerintah bisa menetapkan suatu hukum yang secara tegas tidak diatur oleh nash, tetapi berdasarkan kemaslahatan dibutuhkan oleh manusia. Dapat disimpulkan bahwa fiqh Siyasah mempunyai kedudukan penting juga memiliki posisi yang strategis dalam masyarakat Islam.<sup>43</sup>

Untuk memikirkan, merumuskan dan menetapkan kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim khususnya, dan warga negara lain umumnya. Pemerintah membutuhkan *siyasah syar'iyah*. Tanpa politik hukum pemerintah boleh jadi akan sulit mengembangkan potensi yang mereka miliki. fiqh siyasah (*siyasah syar'iyah*) juga dapat menjamin umat Islam dari hal-hal yang bisa merugikan dirinya. Fiqh siyasah dapat di ibaratkan sebagai akar sebuah

---

<sup>41</sup> *Ibid*, h 22

<sup>42</sup> *Ibid*, h 23

<sup>43</sup> *Ibid*, h 24

pohon yang menopang batang, ranting, dahan dan daun, sehingga menghasilkan buah yang dapat dinikmati oleh umat Islam.<sup>44</sup>

b. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqh siyasah (*siyasah syar'iyah*) diantaranya ada yang menetapkan lima bidang. Namun ada pula yang menetapkannya kepada empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian fiqh siyasah menjadi delapan bidang. Tapi perbedaan ini semua sebenarnya tidak terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis.<sup>45</sup>

T. M. Hasbi Ash Shiddieqy sebagaimana yang dikutip dalam bukunya Muhammad Iqbal, membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bidang, delapan bidang sebagai berikut :<sup>46</sup>

- a. Kebijakan tentang peraturan perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah*).
- b. Kebijakan tentang penetapan hukum (*Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah*).
- c. Kebijakan peradilan (*Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah*).
- d. Kebijakan ekonomi dan moneter (*Siyasah Mâliyyah Syar'iyah*).
- e. Kebijakan administrasi negara (*Siyasah Idariyyah Syar'iyah*).
- f. Kebijakan hubungan luar negeri atau internasional (*Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah*).

---

<sup>44</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h 12

<sup>45</sup> *Ibid*, h 13

<sup>46</sup> *Ibid*, h 14

- g. Politik pelaksanaan undang-undang (*Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah*).
- h. Politik peperangan (*Siyasah Harbiyyah Syar'iyah*).

Sementara menurut Al-Mawardi, ruang lingkup kajian fiqh Siyasah (*Siyasah Syar'iyah*) mencakup :<sup>47</sup>

1. Kebijakan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyyah*).
2. Ekonomi dan moneter (*Siyasah Mâliyyah*).
3. Peradilan (*Siyasah Qadha'iyah*).
4. Hukum perang (*Siyasah Harbiyyah*).
5. Administrasi negara (*Siyasah `Idariyyah*).

Sedangkan Ibnu Taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian, yaitu peradilan, administrasi negara, moneter serta hubungan internasional. Abdul Wahhab Khallaf membagi ruang lingkup kajian fiqh siyasah (*siyasah syar'iyah*) menjadi tiga bidang kajian yaitu peradilan, hubungan internasional dan keuangan negara.<sup>48</sup>

Penjelasan singkat tentang cakupan pembahasan fiqh siyasah (*siyasah syar'iyah*) di atas dapat dipahami bahwa pembahasan pokok fiqh siyasah meliputi berbagai bidang yang terkait erat dengan masalah politik dan kenegaraan. Bidang-bidang tersebut antara lain adalah masalah dusturiah yang mencakup siyasah penetapan hukum, siyasah peradilan, siyasah administrasi dan siyasah penerapan hukum. *Siyasah dusturiyyah* adalah siyasah yang berkaitan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan,

---

<sup>47</sup> *Ibid*, h 14

<sup>48</sup> *Ibid*, h 14

batas kekuasaan pemerintahan, cara pemilihan kepala negara, hubungan penguasa rakyat. Dengan kata lain *siyasah dusturyyah* membahas tentang sistem politik hukum menurut ajaran Islam, politik perundang-undangan, lembaga legeslatif, lembaga yudikatif dan birokrasi atau eksekutif.<sup>49</sup>

Selain bidang *siyasah dusturyyah*. Pembahasan fiqh siyasah (*siyasah syar'iyah*) adalah *Siyasah Dauliyyah/Kharijiyyah*, yaitu Siyasah yang berhubungan dengan pengaturan hubungan antar suatu negara dengan negara lain, tata cara pergaulan hubungan antar warga negara, baik dalam situasi perang maupun damai. Termasuk pula di dalam pembahasan fiqh Siyasah adalah *Siyasah Maliyyah* dan *Siyasah Harbiyyah*. *Siyasah Maliyyah* yaitu siyasah yang mengatur sumber-sumber keuangan Negara Sedangkan *Siyasah Harbiyyah*, yaitu siyasah yang mengatur tentang peperangan dan aspek-aspek lain yang berhubungan dengan hal tersebut.<sup>50</sup>

Berdasarkan beberapa jenis fiqh siyasah, maka secara spesifik fiqh siyasah yang digunakan yakni *Siyasah Dauliyyah/Kharijiyyah*. *Siyasah Dauliyyah* merupakan dalam lingkup kajian Ketatanegaraan Islam, yang mana merupakan kajian akademik mengenai kekuasaan dan keteraturan masyarakat dalam perspektif agama islam yang mencakup hukum, dogma, tradisi, sejarah dan pemikiran tokoh. Termasuk juga di dalam ketatanegaraan

---

<sup>49</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h 14

<sup>50</sup> Juhaya S Praja. 2010, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, Pustaka Setia, Bandung, hlm.

islam mengenai perang untuk menjaga kedaulatan wilayah. Istilah perang banyak yang menyamakannya dengan seruan jihad.<sup>51</sup>

Bidang-bidang *Siyasah Syar'iyah* bukan harga mati yang tak dapat ditawar-tawar. Bidang-bidang *Siyasah Syar'iyah* dapat berbeda-beda antara satu negara Islam dengan negara Islam lainnya dan dapat berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Faktor-faktor lain yang memungkinkan adanya perbedaan dan perkembangan *Siyasah Syar'iyah* itu antara lain perbedaan orientasi politik, latar belakang budaya, tingkat pendidikan, dan sejarah perkembangan Islam itu sendiri di negara masing-masing.<sup>52</sup> Dalam arti kata tidak ada aturan baku yang mengatur ruang lingkup sari *Siyasah Syar'iyah*.

#### c. Kriteria Fiqh Siyasah

Suatu kebijakan politik yang dikeluarkan pemegang kekuasaan harus sesuai dengan semangat syari'at. Kebijakan politik yang dikeluarkan kekuasaan disebut *Siyasah wad'iyah* (sumber-sumber hukum Islam yang tidak berasal dari wahyu). Namun *Siyâsah wad'iyah* harus tetap diseleksi dan diukur dengan kerangka wahyu, kalau ternyata bertentangan atau tidak sejalan dengan semangat wahyu. Maka kebijakan politik yang dibuat tersebut tidak dapat dikatakan sebagai *Siyasah Syar'iyah* dan tidak boleh diikuti.

Sebaliknya, kalau sesuai semangat kemaslahatan dan jiwa syar'iat maka kebijakan dan peraturan perundangundangan yang ditetapkan oleh

<sup>51</sup> *Ibid*, h 25

<sup>52</sup> Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), h 43



penguasa tersebut wajib dipatuhi dan diikuti. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS An Nisa ayat 59 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ  
فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS An Nisa ayat 59)

Salah satu perintah Allah agar manusia memiliki prilaku yang taat.

Serta patuh terhadap Allah, Rasul, dan *Ulul Azmi*. Bahwa asbabun nuzul surat An-Nisa ayat 59 ini berhubungan dengan peristiwa sahabat Abdullah bin Hudzafah bin Qais. Ketika beliau diutus oleh Nabi Muhammad untuk memimpin pasukan perang. Ketika Abdullah memerintahkan para pasukan untuk mengumpulkan kayu untuk dibakar. Maka ketika api tersebut sudah menyala, Abdullah menyuruh para sahabat untuk memasuki api tersebut. Maka ada salah satu pasukan yang bertanya? Sesungguhnya jalan keluar dari api ini hanyalah Nabi Muhammad. Oleh karena itu jangan tergesa-gesa sebelum menemui beliau. Maka jika Nabi Muhammad memerintahkan

kepada kita semua untuk memasuki api ini, maka akan aku masuki api tersebut.<sup>53</sup>

Pergilah para pasukan menghadap kepada Nabi Muhammad, kemudian menceritakan hal tersebut. Maka Nabi Muhammad melarang memasuki api tersebut serta menegaskan bahwa ketaan hanyalah dalam kebaikan. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan dalam hadits, bahwa apabila ada perbedaan diantara manusia, maka harus dikembalikan kepada Al-Qur'an dan Hadits.<sup>54</sup>

Suatu kebijakan politik yang dikeluarkan oleh pemegang kekuasaan harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:<sup>55</sup>

- a. Sesuai dan tidak bertentangan dengan syari'at Islam.
- b. Meletakkan persamaan kedudukan manusia di depan hukum dan pemerintahan.
- c. Tidak memberatkan masyarakat yang akan melaksanakannya
- d. Menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat.
- e. Menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.

Selain kriteria di atas hukum Islam memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan karakteristik sistem hukum lain yang berlaku di dunia. Perbedaan karakteristik ini disebabkan karena hukum Islam berasal langsung dari Allah, bukan dari buatan manusia, dimana semua itu tidak luput dari kepentingan individu dan hawa nafsu pembuatan hukum tersebut.

---

<sup>53</sup> Abduh, Muhammad. Tafsir Al-Qur'an Al-Karim, Juz 'Ammah. (terj.) Muhammad Baghir. Cetakan V. (Bandung: Mizan, 2009), h 217

<sup>54</sup> *Ibid*, h 218

<sup>55</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyash Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h 7

Salah satu contoh karakteristik hukum Islam adalah menyederhanakan beban agar hukum yang ditetapkan oleh Allah dapat dilaksanakan oleh manusia agar dapat tercapai kebahagiaan dalam hidupnya.

Sementara menurut Yusuf Al-Qadharawi sebagaimana yang dikutip dalam bukunya Abdul Manan, berpendapat bahwa karakteristik hukum Islam ada sepuluh, yaitu:<sup>56</sup>

- 1) Hukum Islam itu memudahkan dan menghilangkan kesulitan.
- 2) Memerhatikan tahapan masa atau berangsur-angsur Turun dari nilai ideal menuju realita dalam situasi darurat. Segala hal yang merugikan atau kesengsaraan umat harus dilenyapkan dan dihilangkan.
- 3) Kemudharatan tidak boleh dihilangkan dengan kemudharatan.
- 4) Kemudharatan yang bersifat khusus digunakan untuk kemudharatan yang bersifat umum.
- 5) Kemudharatan yang ringan digunakan untuk menolak kemudharatan yang berat.
- 6) Keadaan terpaksa memudahkan perbuatan atau tindakan yang terlarang.
- 7) Apa yang dibolehkan karena terpaksa, diukur menurut ukuran yang diperlukan.
- 8) Menutup sumber kerusakan didahulukan atas mendatangkan kemaslahatan.

---

<sup>56</sup> Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h 64

#### d. Prinsip-prinsip Fiqh Siyasah

Prinsip-prinsip pemerintahan Islam adalah kebenaran yang dijadikan dasar penyelenggaraan pemerintah dalam perspektif Islam. Prinsip dari pemerintahan Islam sebagaimana yang dirumuskan Muhammad Tahrir Azhary ada sembilan (9) prinsip, adapun prinsip tersebut sebagai berikut :<sup>57</sup>

- 1) Prinsip kekuasaan sebagai amanah.
- 2) Prinsip musyawarah.
- 3) Prinsip perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia .
- 4) Prinsip persamaan.
- 5) Prinsip ketaatan rakyat.
- 6) Prinsip keadilan.
- 7) Prinsip peradilan bebas.
- 8) Prinsip perdamaian.
- 9) Prinsip kesejahteraan.

#### 2. Pengembangan Pasar Tradisional

##### a. Definisi Pengembangan Pasar Tradisional

Pasar tradisional adalah pasar yang dikelola secara sederhana dengan bentuk fisik tradisional yang menerapkan sistem transaksi tawar secara langsung dimana fungsi utamanya adalah untuk melayani kebutuhan masyarakat baik di desa, kecamatan, dan lainnya. Harga yang berlaku di pasar tradisional ini mempunyai sifat yang tidak pasti, oleh karena itu bisa dilakukan tawar-menawar. Bila dilibatkan dari tingkat kenyamanan, pasar

---

<sup>57</sup> Jimly Ash Shidique, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007), h 308

tradisional selama ini cenderung kumuh dengan lokasi yang tidak tertata rapi. Pembeli di pasar tradisional yang biasanya ibu-ibu mempunyai perilaku yang senang bertransaksi dengan berkomunikasi atau berdialog dalam hal penetapan harga, mencari kualitas barang, memesan barang yang diinginkan, dan perkembangan harga-harga lainnya.<sup>58</sup>

Barang yang dijual dipasar tradisional umumnya barang-barang lokal dan ditinjau dari segi kualitas dan kuantitas, barang yang dijual di pasar tradisional dapat terjadi tanpa melalui penyortiran yang kurang ketat. Aspek kuantitas, jumlah barang yang disediakan tidak terlalu banyak sehingga apabila ada barang yang dicari tidak ditemukan di satu kios tertentu, maka dapat dicari ke kios lain. Kendala yang dihadapi pada pasar tradisional diantaranya mengalami kesulitan dalam memenuhi kontinuitas barang, menjaga kualitas barang, lemah dalam penguasaan teknologi dan manajemen sehingga melemahkan daya saing.

Pasar tradisional biasanya dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, termasuk kerjasama swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, dan los yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar.<sup>59</sup>

Sebagian konsumen pasar tradisional adalah masyarakat kelas menengah kebawah yang memiliki karakteristik sangat sensitif terhadap

---

<sup>58</sup> Fred R. David, *Manajemen Strategi Konsep*, (Jakarta: Prenhalindo, 2002), h. 30

<sup>59</sup> Perpes RI No. 112 Tahun 2007 tentang Pembangunan, Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional

harga. Ketika faktor harga rendah yang sebelumnya menjadi keunggulan pasar tradisional mampu diruntuhkan oleh pasar modern, secara relatif tidak ada alasan konsumen dari kalangan menengah kebawah untuk tidak turut berbelanja ke pasar modern dan meninggalkan pasar tradisional.<sup>60</sup>

Pengembangan organisasi merupakan bagian dari ilmu pengetahuan. Pada masa depan, berbagai jenis organisasi hanya akan berkembang dan maju apabila cepat tanggap terhadap arus perubahan yang terjadi. Tuntutan mewujudkan perubahan dapat timbul dari sumber, yaitu dari dalam organisasi harus selalu peka terhadap aspirasi, keinginan, tuntutan dan kebutuhan berbagai kelompok itu dikenal dengan istilah pihak-pihak yang berkepentingan.<sup>61</sup>

Pengembangan dalam teori manajemen organisasi didefinisikan sebagai pengembangan keorganisasian yang meliputi serangkaian tindakan manajemen puncak suatu organisasi, dengan partisipasi para anggota keorganisasian, guna melaksanakan proses perubahan dan pengembangan dalam organisasi yang bersangkutan, hingga dari kondisi yang sedang berlaku sekarang, melalui proses yang berlangsung dalam waktu, dapat dilaksanakan aneka macam perubahan, hingga pada akibatnya dicapai kondisi yang lebih memuaskan dan lebih sesuai dengan tuntutan lingkungan.<sup>62</sup>

---

<sup>60</sup> Pariaman Sinaga, *Menuju Pasar yang Berorientasi Pada Perilaku Konsumen*, 2008. Artikel

<sup>61</sup> Fathul Aminudin Aziz, *Manajemen Dalam Perspektif Islam* (Cilacap: Pustaka El-Bayan, 2012), h. 194.

<sup>62</sup> 2J. Winardi, *Manajemen Perubahan: (The Management Of Change)* Edisi Pertama (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2015), h. 140.



Pengembangan organisasi adalah upaya yang berencana, meliputi keseluruhan organisasi, dan dikelola dari atas untuk meningkatkan efektivitas dan kesehatan organisasi melalui intervensi terencana terhadap proses yang terjadi dalam organisasi dengan memanfaatkan pengetahuan yang berasal dari ilmu perilaku. *National Training Laboratories Institute* menyatakan, “Dengan memanfaatkan pengetahuan dan teknik yang berasal dari ilmu-ilmu perilaku, pengembangan organisasi berupaya untuk mengintegrasikan kebutuhan individual untuk tumbuh dan berkembang bersama dengan tujuan dan sasaran organisasi agar dapat membuat organisasi lebih efektif. Pengembangan organisasi merupakan pencapaian gagasan keunggulan perusahaan untuk memacu dan menyempurnakan sistem manajemen yang sehat yang dapat mengubah dorongan menjadi tindakan.

Pengembangan pasar berhubungan dengan usaha jangka panjang untuk meningkatkan kemampuan organisasi dalam memecahkan masalah dan kemampuannya untuk menanggulangi perubahan dalam lingkungan ekstern atau intern. Pengembangan organisasi adalah proses penilaian sendiri (*self assessment*) dan perubahan berencana berdasarkan sistem nilai (*value based*), yang mencakup strategi dan teknologi spesifik, yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas suatu sistem organisasi secara keseluruhan.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> Komaruddin, *Manajemen Berdasarkan Sasaran* (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), h. 223

Pendekatan pengembangan organisasi dapat pula dianggap sebagai rencana untuk memanfaatkan sumber-sumber daya yang memadai bagi revitalisasi pasar. Dengan cara itu orang mengharapkan pertumbuhan dan pendapatan yang bersinambungan, dan kemampuan organisasi untuk mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan dan pendapatan yang bersinambungan itu perlu berada di dalam pengawasannya sendiri. Upaya ini berhubungan dengan upaya untuk membedakan diri dari ketergantungan meningkatkan kemampuan otonomi dalam pembuatan keputusan-keputusan.<sup>64</sup>

Dalam hal ini peran revitalisasi dalam pengembangan pasar tradisional tentang pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pasar milik pemerintah daerah serta untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada pedagang yang memanfaatkan fasilitas pasar sebagai tempat menjalankan usahanya agar terselenggaranya proses jual beli yang aman dan nyaman.

Mengkaji defenisi-defenisi di atas maka bisa disimpulkan yang menjadi inti dari defenisi-defenisi itu yang meliputi perubahan terencana terhadap pasar tradisional dari segi sistem nilai, peningkatan efektifitas pasar tradisional, dan intervensi pemerintah dari kebijakan revitalisasi sebagai bentuk dari pengembangan pasar tradisional.

---

<sup>64</sup> Komaruddin, *Manajemen Berdasarkan Sasaran* (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), h. 227.

## b. Faktor-Faktor Pengembangan Pasar Tradisional

Suatu Organisasi apa pun sebagai bagian masyarakat, harus peka terhadap lingkungan tersebut. Ada dua faktor yang menuntut adanya pengembangan organisasi yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Tujuan dari analisis lingkungan strategis menurut Tangkilisan adalah untuk mengetahui pengaruh-pengaruh serta pemilihan strategi apa yang sesuai dengan tantangan yang datangnya dari lingkungan.<sup>65</sup>

### 1. Lingkungan Eksternal

Analisis lingkungan eksternal menekankan pada identifikasi trend dan kejadian yang berada di luar kendali perusahaan. Analisis eksternal mengungkapkan peluang dan ancaman utama yang dihadapi perusahaan sehingga manajer dapat memformulasi strategis untuk mengambil keuntungan dari peluang dan menghindari atau mengurangi dampak dari ancaman. Lingkungan eksternal terdiri dari variabel-variabel (kesempatan dan ancaman) yang berada diluar organisasi. Lingkungan eksternal memiliki dua bagian yaitu lingkungan kerja dan lingkungan sosial.

Lingkungan kerja terdiri dari elemen-elemen atau kelompok yang secara langsung berpengaruh atau dipengaruhi oleh operasi-operasi utama organisasi. Beberapa elemen tersebut adalah pemegang saham, pemerintah, pemasok, komunitas lokal, pesaing, pelanggan, kreditur, serikat buruh, dan pedagang.

---

<sup>65</sup> Fathul Aminudin Aziz, *Manajemen Dalam Perspektif Islam*, h. 198

Sedangkan lingkungan sosial terdiri dari kekuatan umum. Kekuatan itu tidak berhubungan langsung dengan aktivitass-aktivitas jangka pendek organisasi tetapi dapat dan sering mempengaruhi keputusankeputusan ekonomi, teknologi, dan politi-hukum dalam hubungannya dengan lingkungan perusahaan secara keseluruhan.

Adanya segala keseluruhan faktor yang ada di luar organisasi yang dapat mempengaruhi organisasi dan kegiatan organisasi. Beberapa faktor tersebut, anatar lain politik, hukum, kebudayaan, tekonologi, sumber daya alam, demografi, dan sebagainya. Penyebab perubahan yang berasal dari luar atau sering disebut lingkungan. Organisasi bersifat responsive terhadap perubahan yang terjadi di lingkungannya. Oleh karena itu, analisis lingkungan eksternal berupaya mengidentifikasi faktor eksternal kunci yang menjadi peluang dan ancaman bagi perusahaan dengan tujuan mengembangkan peluang untuk memberi manfaat dan menghindari apa yang menjadi ancaman yang dapat merugikan perusahaan. Faktor- faktor yang termasuk di dalamnya yaitu factor ekonomi, social, budaya, demografi dan lingkungan, politik, hukum, dan pemerintahan dan faktor teknologi.

## 2. Lingkungan Internal

Semua organisasi memiliki kekuatan dan kelemahan dalam area fungsional bisnis. Analisis lingkungan internal berupaya mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang adaa dalam

perusahaan/organisasi. Lingkungan internal terdiri dari variable-variabel (kekuatan dan kelemahan) yang ada didalam organisasi.

Variabel-variabel tersebut membentuk suasana dimana pekerjaan dilakukan. Variabel itu meliputi:

- 1) Struktur adalah cara bagaimana perusahaan diorganisasikan yang berkenaan dengan komunikasi, wewenang, dan arus kerja.
- 2) Budaya adalah pola keyakinan, pengharapan, dan nilai-nilai yang diberikan oleh anggota organisasi.
- 3) Sumber daya adalah aset yang merupakan bahan baku bagi produksi barang dan jasa organisasi meliputi keahlian orang, kemampuan dan bakat manajerial. Lingkungan internal adalah segala keseluruhan faktor yang ada di dalam organisasi di mana faktor tersebut dapat mempengaruhi organisasi dan kegiatannya.

Penyebab perubahan yang berasal dari dalam organisasi yang bersangkutan dapat berasal dari berbagai sumber. Misalnya, pengaruh kebijakan manajemen organisasi dan gaya sistem dan prosedur, serta sikap karyawan. Perubahan organisasi dilakukan untuk mencocokkan dengan kebutuhan yang ada.

#### c. Dasar Hukum Pengembangan Pasar

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat

Perbelanjaan dan Toko Modern<sup>66</sup>, serta Peraturan Presiden Republik Indonesia No 112 Tahun 2007, definisi pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya, sedangkan pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los maupun tenda yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar.

Syarat-syarat pasar tradisional menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang pembangunan, penataan, dan pembinaan pasar tradisional, adalah:

- 1) Akseibilitas, yaitu kemungkinan pencapaian ke kawasan, dalam kenyataannya ini berwujud jalan, transportasi dan pengaturan lalu lintas.
- 2) Kompatibilitas, yaitu kerasian dan keterpaduan antara kawasan yang menjadi lingkungannya.

---

<sup>66</sup> Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.



- 3) Fleksibilitas, yaitu kemungkinan pertumbuhan fisik atau pemekaran kawasan pasar dikaitkan dengan kondisi fisik lingkungan dan keterpaduan prasarana.

Dalam Peraturan Presiden tersebut juga dibahas tentang penataan pasar tradisional yang menjelaskan bahwa lokasi pendirian pasar tradisional wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota. Dalam ketentuan Pasar Tradisional salah satunya adalah wajib menyediakan fasilitas yang menjamin pasar tradisional yang bersih, sehat (hygienis), dan aman.<sup>67</sup> Dalam hal ini revitalisasi adalah salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terhadap pasar tradisional dalam memenuhi ketentuan wajib di atas.

Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pasar dan Penetapan Tarif Jasa Pengelolaan Pasar menjelaskan di dalam Pasal 13 bahwa :<sup>68</sup>

- 1) Pengembangan pasar adalah pengembangan pasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau PD Pasar
- 2) Pengembangan pasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Badan dan atau PD Pasar sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Harus disesuaikan dengan perkembangan wilayah.
  - b. Sebagai upaya pengembangan embrio pasar.
- 3) Pengembangan pasar yang dilaksanakan oleh Badan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Pengembangan tersebut harus mendapat izin dari PD Pasar.
  - b. Memenuhi perizinan dari Pemerintah Daerah.

---

<sup>67</sup> Perpres No. 112 Tahun 2007 tentang Pembangunan, Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional

<sup>68</sup> Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pasar dan Penetapan Tarif Jasa Pengelolaan Pasar Pasal 13.

- c. Menyiapkan tempat penampungan sementara bagi para pedagang pasar yang beraktivitas di lokasi pasar tersebut.
- d. Membayar kontribusi pada PD Pasar.

### 3. Revitalisasi Sebagai Bentuk Pengembangan Pasar Tradisional

Revitalisasi adalah suatu proses yang harus dilalui oleh pasar tradisional dalam persaingan eraa globalisasi. Banyaknya pasar modern dengan fasilitas yang memadai akan mengurangi peran pasar tradisional. Menurut Danisworo, revitalisasi adalah upaya untuk memvitalkan kembali suatu kawasan atau bagian kota yang dulunya pernah vital atau hidup, akan tetapi kemudian mengalami degradasi.

Revitalisasi dapat dilaksanakan apabila semua pihak yang terkait saling mendukung baik pihak pemerintah, pedagang hingga pembeli. Aspek fisik, aspek ekonomi serta aspek sosial menjadi perhatian yang utama dalam melaksanakan revitalisasi. Kenyamanan dalam aktivitas ekonomi merupakan target yang ingin dicapai, sehingga diharapkan akan memberikan keuntungan bagi semua pihak yang terlibat. Tujuan akhir yang ingin dicapai dengan adanya revitalisasi adalah mencapai kesejahteraan untuk seluruh masyarakat. Masyarakat harus menyadari bahwa berbelanja di pasar tradisional tidak lagi dianggap ketinggalan zaman. Berbelanja di pasar tradisional merupakan salah satu bentuk penghargaan terhadap produk diri sendiri serta menguji kemampuan berkomunikasi. Keberadaan pasar tradisional sudah saatnya dilestarikan untuk menunjang pembangunan perekonomian dari masing-masing daerah.

Program revitalisasi pasar tradisional digagas dengan maksud menjawab semua permasalahan yang melekat pada pasar tradisional. Penyebabnya, pasar tradisional dikelola tanpa inovasi yang berarti yang mengakibatkan pasar menjadi tidak nyaman. Dalam menjalankan aktivitas ekonomi dipasar tradisional, kondisi fisik memegang peranan yang penting. Rancangan fisik pasar harus mempertimbangkan fungsi pasar sebagai tempat aktivitas ekonomi sosial komunitas penggunanya.<sup>69</sup>

Program revitalisasi pasar tradisional juga menyentuh tata kelola (kelembagaan) pasar. Mewujudkan pasar yang profesional haruslah dikelola dengan manajemen yang terpadu dimana seluruh manajemen pasar terintegrasi menjadi satu. Pelaksanaan revitalisasi pasar tradisional merupakan usaha pemerintah agar pasar tradisional mampu bersaing dengan pasar modern. Pembangunan suatu pasar perlu memperhatikan kesejahteraan pedagang maupun pembeli di pasar tersebut.<sup>70</sup>

Lewat penataan kembali pasar tradisional yang memperhatikan aspek kenyamanan, pelayanan dan keamanan, maka potensi yang dimiliki pasar tradisional akan dapat meningkat. Daya saing yang meningkat diharapkan mampu memberi keunggulan komparatif bagi pasar tradisional. Program revitalisasi pasar bertujuan untuk meningkatkan daya saing pasar dan mengaktifkan kembali kegiatan pasar tradisional agar dapat bersaing dengan

---

<sup>69</sup> Iis Nurlaela, Analisis Efektivitas Program Revitalisasi Pasar Tradisional di Pasar Bulu Kota Semarang, (Undip Press: Semarang, 2015) h 26

<sup>70</sup> *Ibid*, h 27

pasar modern sehingga bukan hanya meningkatkan pendapatan pedagang tapi juga meningkatkan daya saing untuk memperluas mangsa pasar.<sup>71</sup>

Peraturan daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2020 menetapkan bahwa :

- 1) Kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) meliputi:
  - a. pasar tradisional;
  - b. pusat perbelanjaan;
  - c. toko modern.
- 2) Pengembangan pengelolaan pasar tradisional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. pengembangan direncanakan pada pusat-pusat BWK dan lingkungan;
  - b. melakukan penataan pasar tradisional di seluruh BWK agar dapat bersaing dengan toko-toko modern seperti minimarket dan supermarket;
  - c. peningkatan kualitas pelayanan, diantaranya memperbaiki sistem sanitasi lingkungan, persampahan, ruang parkir, dan RTH;
  - d. meningkatkan aksesibilitas menuju pasar tradisional baik pengembangan jaringan jalan maupun penyediaan moda transportasi;
  - e. menyediakan areal parkir;

---

<sup>71</sup> *Ibid*, h 27

- f. menyediakan fasilitas yang menjamin pasar tradisional yang bersih, sehat, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman; dan
- g. menyediakan ruang khusus untuk tempat berjualan pedagang kaki lima di sekitar pasar, agar tidak mengganggu kenyamanan dalam berbelanja.

3) Pengembangan pusat perbelanjaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. dipusatkan di kawasan pusat kota Tanjung Karang;
- b. pengembangan diarahkan pada penataan, peremajaan, dan pemantapan;
- c. mengembangkan pusat perbelanjaan baru di setiap SPPK yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, daya dukung dan daya tampung lingkungan serta ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; dan
- d. menyediakan areal parkir seluas kebutuhan parkir, RTH, dan ruang untuk kegiatan sektor informal.

4) Pengembangan toko modern yang dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

- a. pembangunan toko modern dibatasi dan kawasan yang diperkenankan akan diatur dalam peraturan walikota;
- b. menyediakan areal parkir seluas kebutuhan parkir dan memperhatikan aksesibilitas keluar masuk kendaraan serta utilitas yang dibutuhkan; dan

- c. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional, usaha kecil, dan usaha menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan.<sup>72</sup>

Dengan diadakannya program revitalisasi, pasar tradisional siap menyaingi serbuan pasar modern. Pasar tradisional akan kembali dilirik oleh konsumen jika citra buruk yang melekat selama ini dihapuskan. Kuncinya adalah pasar tradisional harus ditata sedemikian rupa sehingga keadaannya menjadi bersih dan nyaman bagi pengunjung termasuk menjaga kualitas kesehatan produk yang dijual. Pemerintah haruslah proaktif untuk menghidupkan kembali pasar tradisional begitu juga dengan para pedagang dan pengelola pasar harus konsisten untuk menjaga aura pasar tradisional untuk kebersihan pasca revitalisasi tetap terjaga disertai juga dengan tata kelola pasar yang profesional.<sup>73</sup>

#### 4. Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Pasar

Dalam rangka pembinaan pasar tradisional, Dinas Pengelolaan Pasar melakukan sejumlah pengelolaan dan pemberdayaan dengan tujuan sebagai berikut:<sup>74</sup>

- a. Menciptakan pasar tradisional yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat.
- b. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

---

<sup>72</sup> Peraturan daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2020

<sup>73</sup> A.A Mirah Pradnya Paramita, *Efektifitas Dan Dampak Program Revitalisasi Pasar Tradisional*, Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana, Jurnal Publikasi, 2013

<sup>74</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional.



- c. Menjadikan pasar tradisional sebagai penggerak roda perekonomian daerah.
- d. Menciptakan pasar tradisional yang berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern.

Menurut Peraturan Mendagri, pengelolaan pasar yang baik seyogyanya diikuti oleh suatu ukuran keberhasilan, karena itu indikator pengelolaan pasar yang berhasil perlu manajemen operasional,<sup>75</sup> di antaranya:

- a. Manajemen yang transparan, meliputi:
  - 1. Pengelolaan manajemen pasar yang transparan dan profesional.
  - 2. Konsekuensi dengan peraturan yang ditegakkannya dan tegas dalam menegakkan sanksi jika terjadi pelanggaran.

b. Keamanan

c. Sampah

Para pedagang membuang sampah pada tempatnya. Tong sampah tersedia di banyak tempat, sehingga memudahkan bagi pengunjung untuk membuang sampah.

d. Ketertiban

Tercipta ketertiban di dalam pasar. Ini terjadi karena para pedagang telah mematuhi semua aturan main yang ada dan dapat menegakkan disiplin serta bertanggung jawab atas kenyamanan para pengunjung atau pembeli.

---

<sup>75</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 pasal 10 Tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional

e. Pemeliharaan

Pemeliharaan bangunan pasar dapat dilakukan baik oleh pedagang maupun pengelola. Dalam hal ini telah timbul kesadaran yang tinggi dari pedagang untuk membantu manajemen pasar memelihara sarana dan prasarana pasar seperti saluran air, ventilasi udara, lantai pasar, kondisi kios dan lain sebagainya.

f. Pasar sebagai sarana/fungsi interaksi sosial

Pasar yang merupakan tempat berkumpulnya orang-orang dari berbagai suku di tanah air menjadi sarana yang penting untuk berinteraksi dan berekreasi. Tercipta suasana damai dan harmonis di dalam pasar.

g. Pemeliharaan pelanggan.

h. Produktifitas pasar cukup tinggi

Pemanfaatan pasar untuk berbagai kegiatan transaksi menjadi optimal. Terjadi pembagian waktu yang cukup rapi dan tertib.

Untuk mencapai indikator keberhasilan diatas, maka pengelola pasar wajib memperhatikan peningkatan mutu dan pembenahan pengaturan sarana fisik pasar,<sup>76</sup> di antaranya:

1. Perencanaan Tata Ruang Pola

perletakan berbagai prasarana dan sarana yang ada telah mempertimbangkan beberapa pendekatan antara lain:

---

<sup>76</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 pasal 21 Tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional

- a. Ada pengaturan yang baik terhadap pola sirkulasi barang dan pengunjung di dalam pasar dan ada tempat parkir kendaraan yang mencukupi. Keluar masuknya kendaraan tidak macet.
- b. Dari tempat parkir terdapat akses langsung menuju kios di pasar.
- c. Distribusi pedagang merata atau tidak menumpuk disatu tempat.
- d. Sistem zoning sangat rapi dan efektif sehingga mempermudah konsumen dalam menemukan jenis barang yang dibutuhkan.
- e. Penerapan zoning mixed-used, menggabungkan peletakan los dan kios dalam satu area, yang saling menunjang.
- f. Fasilitas bongkar muat (loading-unloading) yang mudah dan meringankan material handling.
- g. Jalan keliling pasar, mencerminkan pemerataan distribusi aktifitas perdagangan.
- h. Ada tempat penimbunan sampah sementara (TPS) yang mencukupi.
- i. Terdapat berbagai fasilitas umum: ATM Centre, Pos Jaga kesehatan, mushola, toilet, dll.
- j. Tempat pemotongan ayam yang terpisah dari bangunan utama.
- k. Ada bangunan kantor untuk pengelola pasar, Keamanan, Organisasi Pedagang.

## 2. Arsitektur bangunan

Dibutuhkan lahan atau ruang yang besar dengan rencana bangunan yang memadai.

### 3. Pengaturan Lalu Lintas

Untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan bagi para pengunjung pasar maka pengaturan lalu lintas dilakukan sebagai berikut:

- a. Kendaraan Pengunjung harus dapat parkir di dalam area pasar.
- b. Terdapat jalan yang mengelilingi pasar dan mencukupi untuk keperluan bongkar muat dan memiliki 2 lajur guna menghindari penumpukan/antrian.

### 4. Kualitas Konstruksi

- a. Prasarana jalan menggunakan konstruksi rigid
- b. Konstruksi bangunan menggunakan bahan yang tahan lama dan mudah dalam maintainancenya.
- c. Lantai pasar keramik.
- d. Rolling door untuk kios dan dinding plester aci dengan finishing cat.
- e. Drainase dalam menggunakan buis beton sedangkan di luar dengan saluran tertutup.

### 5. Air bersih & Limbah

- a. Pengadaan air bersih menggunakan sumur dalam dan di tampung di reservoir.
- b. Ada sumur resapan diberbagai tempat sebagai antisipasi terhadap melimpahnya buangan air hujan.
- c. Pembuangan limbah terdiri dari:
  - 1) Buangan air kotor dapat disalurkan menuju drainase biasa.

- 2) Buangan limbah kotoran oleh karena pertimbangan higienis harus ditampung dalam septic tank, baru kemudian cairannya dialirkan pada resapan.
- 3) Pembuatan saluran pembuangan air rembesan dengan desain khusus pada kios/los yang menjual dagangan yang harus selalu segar/basah (ikan dan daging).

d. Sistem Elektrikal

e. Pencegahan Kebakaran

f. Penanggulangan Sampah

Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pasar dan Penetapan Tarif Jasa Pengelolaan Pasar Pasal 14 menjelaskan bahwa :<sup>77</sup>

1. Penunjukan pemakaian tempat penjualan yang disediakan ditetapkan dengan keputusan Dewan Direksi.
2. Pengisian ruang dagangan ditetapkan berdasarkan pengelompokkan jenis barang dagangan oleh Direksi.

## B. Tinjauan Pustaka

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis.

---

<sup>77</sup> Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pasar dan Penetapan Tarif Jasa Pengelolaan Pasar Pasal 14

Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

1. Penelitian Ainun Lativah, 2018, Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul “Pengelolaan Retribusi Pasar Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Dalam Perspektif Ekonomi Islam.”

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan retribusi pasar di Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung masih belum maksimal yaitu dengan tidak tercapainya hasil penerimaan retribusi pasar karena berbagai kendala dalam pelaksanaan pengelolaan retribusi pasar. Pengelolaan retribusi pasar yang diterapkan Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung menurut perspektif ekonomi Islam yaitu dalam kegiatan retribusi pasar sesuai dengan ajaran Islam yaitu petugas retribusi pasar berakhlakul karimah terhadap pedagang sebagai wajib retribusi. Petugas retribusi pasar bersikap sopan saat menagih retribusi terhadap pedagang.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian Ainun Lativa membahas tentang pengelolaan retribusi pasar di Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung. Sedangkan penulis fokus kepada peran pemerintah daerah dalam pengembangan pasar tradisional di Kota Bandar Lampung.

2. Penelitian Ariswan Barmawi, 2016, Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial Universitas Lampung yang



berjudul “Pengelolaan Pasar Tradisional di Kota Bandar Lampung oleh Dinas Pengelolaan Pasar”.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen Dinas Pengelolaan Pasar dalam mengelola pasar tradisional Tugu belum berjalan dengan baik, seperti dalam planning, organizing, actuating, controlling Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung belum menjalankan fungsi-fungsi manajemen tersebut dengan optimal. Hal ini di karenakan masih banyaknya permasalahan yang terjadi di pasar tradisional Tugu.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian Ariswan Barmawi membahas tentang pengelolaan pasar tradisional Kota Bandar Lampung. Sedangkan penulis fokus kepada peran pemerintah daerah dalam pengembangan pasar tradisional di Kota Bandar Lampung.

3. Penelitian Nurul Adawiyah Hasibuan, 2017, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara yang berjudul “Analisis Dampak Relokasi Pasar Tradisional Terhadap Pendapatan pedagang Sesudah dan Sebelum Relokasi ke Pasar Induk di Kota Medan.”

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pandangan pedagang terhadap pengelolaan pasar tradisional tersebut sudah baik, hanya saja sebagian pedagang tidak setuju di relokasi dikarenakan lokasi berjualan tidak ramai dikunjungi pembeli akibat sedikitnya sarana transportasi yang melewati daerah pasar tersebut. Selain itu dikarenakan kondisi bangunan yang tidak

memungkinkan dengan di batasi tembok-tembok, masuknya tempias hujan dan juga iuran per bulannya yang sangat mahal.

Penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan beberapa penelitian sebelumnya. Penulis fokus pada implementasi Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pasar Dan Tarif Jasa Pengelolaan Pasar. Sementara penelitian sebelumnya membahas tentang pengelolaan retribusi pasar tradisional, pengelolaan pasar tradisional, dan dampak relokasi pasar tradisional.



## DAFTAR PUSTAKA

- A.A Mirah Pradnya Paramita, *Efektifitas Dan Dampak Program Revitalisasi Pasar Tradisional* , Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana, Jurnal Publikasi, 2013
- Ahmad AL-Haritsi, Jaribah bin. 2006. *Fikih Ekonomi Umar bin AL-Khatab*. Jakarta: Khalifah.
- Anung Pramudyo, *Menjaga Eksistensi Pasar Tradisional* , JBMA, Vol. II, No. 1, Maret 2014, ISSN : 2252-5483 hlm, 83.
- Arikonto, Suharsami . 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Penerbit Art
- Eko Suprayitno, 2005. *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Fathul Aminudin Aziz. 2002. *Manajemen Dalam Perspektif Islam*. Cilacap: Pustaka El-Bayan.
- Fred R. David, *Manajemen Strategi Konsep*, (Jakarta: Prenhalindo, 2002)
- Ikhwan Abidin Basri, *Menguak Pemikiran Ekonomi Ulama Klasik* (Jakarta: Aqwan, 2007)
- Komaruddin. 1990. *Menejemen Berdasarkan Sasaran*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Majid, Abdul. 2005. *Perencanaan Pembelajaran*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mashuyhuri. 2007. *Ekonomi Mikro*. Malang : UIN Malang Perss.
- Moleong, Lexy. J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- P3EI. 2008. *Ekonomi Islam*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Pariaman Sinaga, *Menuju Pasar yang Berorientasi Pada Perilaku Konsumen*, 2008. Artikel
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012

Tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 pasal 10 Tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional

Peraturan Presiden Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan , dan Toko Modern.

Republik Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia No 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar tradisional

Rosyada, Dede. 1994. *Hukum Islam dan Pranata Sosial: Dirasah Islamiyah III*. Rajawali Grafindo Persada. Jakarta.

Rosyidi, Suherman. 2007. *Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro Cet. VII*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Rustam Kamaludin, *Pengantar Ekonomi Pembangunan* (Jakarta: FEUI, 1999)

Siddiqi, Muhamad Nejatullah. 2004. *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam cet III*. Jakarta: Bumi Aksara

Soekanto, Soejono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta.

Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sujerni, Wiratna. 2015. *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Sumodiningrat, Gunawan. 1998. *Membangun Perekonomian Rakyat* . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

UU No 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Winardi, *Manajemen Perubahan: (The Management Of Change)* Edisi Pertama (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2015), h. 140

Zainudin Ali, *Hukum perbankan* ,( Jakarta : Sinar Grafika, 2008), h. 20.